

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan di sekolah dasar memiliki peran esensial dan merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya yang bermutu dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen ini dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dengan masyarakat, serta mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan. Selain itu, Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk melalui kemitraan dengan berbagai pihak.

Peningkatan mutu pendidikan dasar saat ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran atau sarana-prasarana, melainkan semakin juga ditentukan oleh kapasitas lembaga sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, merancang praktik pembelajaran yang kontekstual, serta membangun jejaring kemitraan dengan berbagai aktor lokal. Perubahan kebijakan kurikulum dan tuntutan akuntabilitas publik menempatkan kepala sekolah pada posisi strategis sebagai manajer administratif, pemimpin instruksional, dan fasilitator kolaborasi yang harus mampu menggerakkan guru, komite sekolah, orangtua, dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan merupakan isu fundamental dalam reformasi pendidikan yang mendorong sinergisasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai ekosistem pembelajaran yang terintegrasi. Paradigma kepemimpinan modern telah mengalami pergeseran dari

model kepemimpinan administratif yang bersifat hierarkis menuju kepemimpinan transformasional dan kolaboratif yang menekankan partisipasi aktif, pemberdayaan kolektif, dan penciptaan visi bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola aspek internal sekolah, tetapi juga berperan sebagai fasilitator strategis dalam membangun jejaring kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan institusi pendidikan. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kemitraan Pendidikan yang memberikan dasar operasional bagi kemitraan antara satuan pendidikan dengan lembaga pendidikan lain, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses, serta memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat

Kemitraan sekolah-keluarga-masyarakat merupakan bentuk kolaborasi terstruktur yang berlandaskan asas gotong royong, kesetaraan kedudukan, saling percaya, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Penelitian empiris terkini menunjukkan bahwa kemitraan yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan prestasi siswa, keterlibatan guru, dan pengembangan sekolah secara holistik. Teori kepemimpinan transformasional Bass dan Riggio (2021) menegaskan bahwa pemimpin yang mampu menginspirasi, memberikan stimulasi intelektual, dan memberikan pertimbangan personal kepada setiap anggota organisasi akan menciptakan lingkungan kolaboratif yang kondusif bagi inovasi dan perubahan berkelanjutan. Selain itu, dimensi kepemimpinan instruksional juga

memainkan peran penting, di mana kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mendefinisikan misi sekolah, mengelola kurikulum dan pembelajaran, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung kemitraan dengan stakeholder eksternal.

Penelitian oleh Wijayanti dan Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa sekolah dasar di wilayah pedesaan Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, akses internet yang minim, dan disparitas kualitas sumber daya manusia, yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang responsif untuk mengoptimalkan kemitraan sebagai alternatif peningkatan mutu pendidikan. Hal ini sejalan dengan yang hasil penelitian Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa komitmen kepala sekolah dalam mengimplementasikan kepemimpinan kolaboratif mampu memanfaatkan potensi komunitas lokal melalui strategi adaptif, meskipun di tengah keterbatasan sumber daya

Meskipun demikian, penelitian tentang kemitraan kepala sekolah masih menunjukkan gap signifikan dalam literatur ilmiah. Mayoritas studi lebih fokus pada dimensi internal manajemen sekolah, kepemimpinan transformasional secara umum, atau aspek kepemimpinan instruksional dalam pembelajaran, sementara kajian sistematis mengenai model, strategi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kemitraan efektif dalam konteks sekolah dasar di pedesaan masih sangat terbatas. Penelitian dengan pendekatan studi multisitus yang menggabungkan analisis komparatif dengan eksplorasi kualitatif untuk memahami dinamika kemitraan kepala sekolah dalam konteks lokal yang spesifik juga masih jarang ditemukan.

Studi multisitus di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan dipilih karena kedua sekolah tersebut merepresentasikan konteks unik sekolah dasar di wilayah pedesaan yang menghadapi tantangan struktural namun memiliki potensi kemitraan yang signifikan. Keunikan lembaga yang diteliti terletak pada komitmen kepala sekolah dalam mengimplementasikan kepemimpinan kolaboratif yang memanfaatkan potensi komunitas lokal melalui strategi adaptif dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Sekolah dasar di wilayah pedesaan Indonesia menghadapi isu krusial terkait keterbatasan infrastruktur, akses internet yang minim, dan disparitas kualitas sumber daya manusia yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang responsif untuk mengoptimalkan kemitraan sebagai alternatif peningkatan mutu pendidikan.

Urgensi penelitian ini sangat nyata mengingat peran krusial sekolah dasar sebagai fondasi pendidikan formal yang menentukan kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik di masa depan. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, paradigma kepemimpinan responsif dan kolaboratif telah menjadi arahan strategis yang diidentifikasi melalui berbagai regulasi terkini, termasuk penetapan kompetensi kepemimpinan pendidikan yang menekankan kemampuan membangun kemitraan strategis. Peningkatan kemitraan sekolah dengan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya berdampak pada perluasan sumber daya material dan dukungan finansial, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan keberlanjutan program pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pengembangan teori kepemimpinan pendidikan yang inklusif dan berbasis konteks,

serta memperkaya pemahaman tentang operasionalisasi kepemimpinan kolaboratif di tingkat satuan pendidikan yang masih terbatas dalam literatur Indonesia.

Dalam dimensi sosial, penelitian ini relevan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Tantangan yang dihadapi sekolah dasar pedesaan mencakup keterbatasan akses ke infrastruktur pendidikan, kualitas guru yang heterogen, dan terbatasnya dukungan administratif dari pemerintah daerah, yang kesemuanya dapat dimitigasi melalui strategi kemitraan yang efektif dan kepemimpinan yang adaptif. Lebih jauh, pentingnya profesionalisme guru sebagai komponen utama dalam peningkatan mutu pendidikan hanya dapat terwujud melalui lingkungan organisasi yang mendukung, yang mana penciptaan budaya sekolah yang kolaboratif dan berbasis kemitraan menjadi prasyarat essential. Pergeseran paradigma dari pendekatan struktural-administratif menuju pendekatan kultural dalam pengelolaan sekolah mengakui bahwa peningkatan mutu pendidikan harus berlandaskan pada kepemimpinan yang mampu mengsinergikan nilai-nilai internal institusi dengan sumber daya eksternal melalui kemitraan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi model kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat, mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam membangun kemitraan, dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang berbasis bukti empiris dan dapat diterapkan secara kontekstual di wilayah pedesaan.

Mengacu pada kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi empiris yang konkret bagi pengembangan teori kepemimpinan pendidikan yang lebih sensitif terhadap konteks, sekaligus rekomendasi praktis bagi kepala sekolah, komite, dan pembuat kebijakan daerah untuk memperkuat kemitraan sekolah–komunitas yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?
2. Bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi model kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?

2. Untuk mendeskripsikan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi bermakna baik secara teoritis maupun praktis, sejalan dengan pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoretis yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang dapat diterapkan langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjembatani teori kepemimpinan pendidikan dengan praktik lapangan di konteks sekolah dasar negeri pedesaan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan akademik yang signifikan terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam bidang kepemimpinan sekolah dan pengembangan sumber daya manusia pendidikan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengayaan Teori Kepemimpinan Pendidikan.

Menyediakan data empiris tentang variasi strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam konteks multisitus, yang memperkaya pemahaman tentang

kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar.

2. Pengembangan Model Kepemimpinan Kontekstual.

Menghasilkan kerangka analisis faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

3. Referensi Akademik.

Menjadi sumber kajian primer bagi peneliti lain yang mengkaji dinamika kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara aplikatif, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi berbagai pemangku kepentingan pendidikan di tingkat operasional dan kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Sekolah SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II Pasrepan.

Menyediakan panduan strategi kepemimpinan dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Lembaga masing-masing

2. Bagi Guru Sekolah Dasar.

Memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

3. Bagi Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.

Memberikan rekomendasi untuk merencanakan program pembinaan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi Lanjutan.

Menjadi pijakan metodologis untuk replikasi studi multisitus di wilayah lain, dengan temuan yang dapat dikembangkan menjadi penelitian intervensi dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam skala lebih besar.

Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini tidak hanya terbatas pada konteks lokal SDN Tempuran I dan SDN Tempuran II, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi peningkatan mutu pendidikan dasar melalui penguatan kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun kemitraan untuk meningkatkan mutu Pendidikan yang sejalan dengan prioritas pembangunan SDM unggul sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

1.5 Definisi Istilah

1.5.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses sosial dan dinamis di mana seorang atau sekelompok individu (pemimpin) mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota organisasi atau pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, membentuk visi, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, inovasi, dan pencapaian mutu. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan sekolah mencakup kemampuan kepala sekolah untuk (1) merumuskan visi dan tujuan pembelajaran, (2) membangun kemitraan

internal dan eksternal, (3) memberdayakan guru dan staf melalui pengembangan profesional, serta (4) menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.

1.5.2 Kemitraan

Kemitraan dapat didefinisikan sebagai hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, seperti sekolah dengan orang tua, sekolah dengan masyarakat, dunia usaha/industri, lembaga eksternal, atau pemangku kepentingan lainnya yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama, saling membutuhkan dan saling memberi manfaat, dengan tujuan mencapai hasil atau tujuan bersama.

Dalam konteks pendidikan, kemitraan (misalnya antara sekolah, orang tua, masyarakat, dunia usaha/industri) mencakup bentuk-bentuk kolaborasi, aliansi strategis, dan jaringan (network) yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, kesiapan kerja lulusan, pengembangan karakter siswa, serta keberlanjutan organisasi sekolah.

1.5.3 Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan adalah tingkat pencapaian atau kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di mana suatu lembaga pendidikan — melalui manajemen, kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan belajar — mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, karakter, dan kapabilitas sesuai dengan standar pendidikan nasional serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Mutu pendidikan mencakup aspek input (sarana, guru, manajemen), proses (pembelajaran, pelayanan pendidikan), dan

output/outcome (hasil belajar, kompetensi, keunggulan lulusan, relevansi dengan kebutuhan zaman).

Di dalam konteks sistem pendidikan, mutu pendidikan meliputi tidak hanya kemampuan akademik siswa, tetapi juga aspek holistik seperti pengembangan karakter, keterampilan abad 21, relevansi kurikulum, infrastruktur pendidikan yang memadai, serta kemampuan lembaga untuk menjamin keberlanjutan kualitas melalui manajemen dan penjaminan mutu.